

## MODEL DAN STRATEGI PEMBELAJARAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM *SETTING* PENDIDIKAN INKLUSI

Agung Nugroho, Lia Mareza  
PGSD-FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto  
email: agungnugroho\_ump@yahoo.co.id

**Abstract:** Every citizen has the same right to receive a quality education. A citizen who had a physical rudiment, emotional, mental, intelectual and social have a right to receive special education. Education inclusive is the process of education that allows all children had the opportunity to participate fully in the regular class, without looking at disorder, race, or other characteristic. This research based on problems that not all villagers on the state of acquiring education services, especially a citizen who has limitation certain. This research is directed to find and provide an overview of how the implementation of inclusive education system that reaches all citizens regardless of the weaknesses and shortcomings of learners. The research is conducting with qualitative study that have been carried out in SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto as one of a school of inclusion. The results shows that classroom inclusions in SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto using the model of clasical and individual learning.

Keyword: Model, Learning Strategic, Education Inclusive

**Abstrak:** Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Pendidikan inklusif adalah proses pendidikan yang memungkinkan semua anak berkesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kelas regular, tanpa memandang kelainan, ras, atau karakteristik lainnya. Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan bahwa belum semua warga negara memperoleh layanan pendidikan. Khususnya warga negara yang memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu. Penelitian ini diarahkan untuk mencari dan memberikan gambaran bagaimana sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat menjangkau semua warga negara tanpa memperhatikan kelemahan dan kekurangan peserta didik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto sebagai salah satu sekolah inklusi. Hasil penelitian menunjukkan model pembelajaran inklusi di SD N 1 Tanjung menggunakan model pembelajaran klasikal dan individual bagi siswa berkebutuhan khusus.

Kata Kunci : Model, Strategi Pembelajaran, Pendidikan Inklusi

### Pendahuluan

Pendidikan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, tidak terkecuali bagi anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus. Dalam

Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap warga negara

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki hambatan, kelainan dan/atau memiliki kemampuan potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam layanan pendidikan. Hal tersebut dipertegas dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maupun dalam Peraturan Mendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Prastiyono, 2013: 117).

Amanat hak atas pendidikan bagi anak penyandang kelainan atau ketunaan ditetapkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 disebutkan bahwa: "Pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat

istimewa". Ketetapan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tersebut bagi anak penyandang kelainan sangat berarti karena memberi landasan yang kuat bahwa anak berkelainan perlu memperoleh kesempatan yang sama sebagaimana yang diberikan kepada anak normal lainnya dalam hal pendidikan dan pengajaran (Efendi dalam Anjaryati, 2011). Pemerintah dalam upaya pemerataan layanan pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang berkualitas bagi semua anak di Indonesia mempunyai makna yang sangat luas dan strategis. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1986 telah dirintis pengembangan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif yang melayani penuntasan wajib belajar bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Untuk mencerdaskan bangsa yang selaras dengan adanya pesan dari Pendidikan Untuk Semua (*Educational for All*) sekaligus menjadi salah satu usaha meningkatkan partisipasi anak-anak bersekolah (pemerataan kesempatan pendidikan) termasuk anak berkebutuhan khusus (Sukinah dalam Nugroho, 2016).

Mialaret (dalam Anjaryati, 2011) menyatakan bahwa, "Sudah disepakati

oleh seluruh masyarakat di dunia tanpa memandang perbedaan ras, tingkat kemodernan dan sosio-kulturalnya, bahwa setiap anak harus memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan". Dan dalam kaitannya UNESCO merasa bertanggung jawab dalam hal konstitusinya untuk mengatur kerja sama antar bangsa guna memajukan kesamaan kesempatan dalam pendidikan. Berbagai kerumitan memang melingkupi pendidikan baik dari segi internal anak itu sendiri, misalnya, adanya hambatan fisik dan mental, maupun dari segi eksternalnya seperti masalah ekonomi keluarga yang pada gilirannya memunculkan kelaparan, kekurangan gizi, dan berbagai permasalahan lainnya. Prastiyono (2013) menambahkan bahwa pengakuan atas hak pendidikan bagi setiap warga negara, juga diperkuat dalam berbagai deklarasi internasional. Pada tahun 1948, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990), Peraturan Estándar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993), Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO (1994), Undang-undang Penyandang Kecacatan (1997), Kerangka Aksi Dakar

(2000) dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004). Deklarasi tersebut diperkuat lagi dalam *Convention on The Rights of The Child* yang diselenggarakan oleh PBB (1989) dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya dalam *The World Convention on Education for All* di Jamtien, Thailand (1990), yang kemudian dikenal dengan *The Jamtio Declaration*, antara lain juga ditegaskan perlunya memperluas akses pendidikan kepada semua anak, remaja, dan dewasa, juga memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak perempuan. Deklarasi Jamtien ini diperkuat lagi dalam *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* tahun 1994 yang secara lebih tegas menuntut agar pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus bersifat inklusif, sehingga sistem pendidikan yang memisahkan individu dan komunitasnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Pendidikan inklusif adalah suatu proses pendidikan yang memungkinkan semua anak berkesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kelas reguler, tanpa memandang kelainan, ras, atau karakteristik lainnya. Pendidikan inklusif memberikan berbagai kegiatan dan

pengalaman, sehingga semua siswa dapat berpartisipasi dan berhasil dalam kelas reguler yang ada di sekolah tetangga atau sekolah terdekat. Dengan demikian kehadiran pendidikan inklusif berpotensi mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi setiap anak dengan segala keragamannya, terutama anak berkebutuhan khusus. Keuntungan dari pendidikan inklusif semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi. Adapun filosofi yang mendasari pendidikan inklusi adalah keyakinan bahwa setiap anak, baik karena gangguan perkembangan fisik/mental maupun cerdas/bakat istimewa berhak untuk memperoleh pendidikan seperti layaknya anak-anak "normal" lainnya dalam lingkungan yang sama. Secara lebih luas, ini bisa diartikan bahwa anak-anak yang "normal" maupun yang dinilai

memiliki kebutuhan khusus sudah selayaknya dididik bersama-sama dalam sebuah keberagaman yang ada di dalamnya, pendidikan inklusif diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi anak bersekolah (berkebutuhan khusus) dan dalam waktu bersamaan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Di sini, mereka tidak semata mengejar kemampuan akademik, tetapi lebih dari itu, mereka belajar tentang kehidupan itu sendiri.

Sunaryo (2009: 1) menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada angka pasti tentang jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia. Namun, yang pasti jumlah mereka yang belum memperoleh hak pendidikan masih sangat banyak. Data resmi Direktorat PSLB tahun 2007 menyebutkan bahwa jumlah ABK yang sudah mengikuti pendidikan formal baru mencapai 24,7% atau 78.689 anak dari populasi anak cacat di Indonesia, yaitu 318.600 anak (Direktorat PSLB, 2008). Ini artinya masih terdapat sebanyak 65,3% ABK yang masih terseklusi, termarginalisasikan dan terabaikan hak pendidikan. Bahkan angka tersebut diperkirakan dapat jauh lebih besar mengingat kecilnya angka prevalensi yang digunakan, yaitu 0,7%

dari populasi penduduk serta masih buruknya sistem pendataan.

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan bahwa belum semua warga negara memperoleh layanan pendidikan. Khususnya warga negara yang memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan untuk mencari solusi pemecahan masalah bagaimana sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat menjangkau semua warga negara dengan tanpa memperhatikan kelemahan dan kekurangan peserta didik. SD Negeri 1 Tanjung merupakan salah satu sekolah inklusi yang berada di Purwokerto yang memulai layanan pendidikan inklusif sejak tahun pelajaran 2004/2005 sebagai SD Rintisan SD Inklusif dengan payung hukum yaitu Keputusan Bupati Banyumas No. 421/149/2011 dan Permendiknas No. 70 Tahun 2009.

### **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto sebagai salah satu sekolah inklusi. Subjek penelitian yaitu kepala sekolah, guru kelas, guru pendamping, siswa dan wali murid. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan

beberapa macam teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, metode observasi, dan metode studi dokumen.

### **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SD Negeri 1 Tanjung diketahui bahwa guru sudah melakukan pembelajaran adaptif bagi anak berkesulitan belajar yaitu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi siswa. Artinya pembelajaran tersebut menyesuaikan dengan kondisi peserta didik itu sendiri, bukan peserta didik menyesuaikan dengan pembelajaran, yang tentunya penyesuaian tersebut berkaitan dengan metode strategi, materi, alat/media pembelajaran, dan lingkungan belajar. Model pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas 4 dan 5 yaitu model klasikal dimana siswa normal dan berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran dalam satu kelas. Model kedua yaitu model pembelajaran individual dimana siswa yang mengalami kesulitan belajar/berkebutuhan khusus mendapatkan tambahan jam belajar yang biasanya dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai. Selain itu di SD Negeri

1 Tanjung terdapat guru pendamping yang bertugas mendampingi guru kelas ketika di dalam pembelajaran guru kelas tersebut mengalami kesulitan. Strategi guru dalam mengajar kelas inklusi yaitu guru menyampaikan materi pelajaran yang diselingi dengan sedikit permainan atau games. Hal ini dikarenakan siswa kelas inklusi cenderung memiliki tingkat konsentrasi yang dibawah rata-rata.

Teknik evaluasi yang dilakukan oleh guru kelas dengan cara mengurangi kompetensi bagi kelas inklusi serta menurunkan tingkat materi bagi siswa. Adapun strategi atau metode yang biasa dilakukan guru seperti tanya jawab, diskusi yang dikemas menggunakan teknik-teknik yang dimiliki oleh guru kelas itu sendiri dengan menyesuaikan kondisi peserta didiknya begitu juga dengan penataan tempat duduk yang dibuat melingkar dan mengelompok. Dalam hal penilaian siswa kelas inklusi mendapatkan dua buah buku laporan siswa yaitu laporan nilai (raport) dan buku laporan perkembangan siswa. Selain berkordinasi dengan guru pendamping pihak SD 1 Negeri Tanjung juga mengadakan pertemuan rutin dengan para wali siswa kelas inklusi, tujuannya agar pihak orang tua juga ikut membimbing dan mengarahkan

perkembangan putra-putrinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa berkebutuhan khusus diketahui bahwa mereka sangat menyayangi dan memperhatikan perkembangan putra putrinya selama di sekolah. Hal ini juga diutarakan oleh kepala sekolah, guru kelas dan guru pendamping bahwa orang tua sangat perhatian pada putra putrinya. Hal inilah yang memang seharusnya dilakukan para orang tua yang dikaruniai anak spesial. Dalam hal terapi orang tua bekerjasama dengan pihak sekolah tentang bagaimana perkembangan anak.

Berdasarkan hasil penelitian kendala yang dialami SD N 1 Tanjung dalam penerapan pendidikan inklusi yaitu sebagai berikut: (1) pendidikan inklusi saat itu masih menjadi hal yang baru di kabupaten Banyumas; (2) latar belakang pendidikan para guru yang masih belum sesuai kualifikasi karena di SD N 1 Tanjung baru ada satu guru yang memiliki latar belakang psikologi; (3) kurikulum bagi siswa yang normal dan siswa yang spesial terutama dalam hal standar penilaian/evaluasi; (4) perhatian dari pemerintah masih kurang terkait pelaksanaan pendidikan inklusi baik dari segi sarana prasarana dan biaya; (5) sarana dan prasarana yang masih

terbatas untuk sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi; dan (6) pelatihan atau workshop terkait pendidikan inklusi bagi guru yang berlatar belakang pendidikan diluar psikologi/PLB masih kurang.

Temuan tersebut hendaknya ditindaklanjuti karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki hambatan, kelainan dan/atau memiliki kemampuan potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam layanan pendidikan. Pendidikan inklusif adalah suatu proses pendidikan yang memungkinkan semua anak berkesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kelas reguler, tanpa memandang kelainan, ras, atau karakteristik lainnya. Pendidikan inklusif memberikan berbagai kegiatan dan pengalaman, sehingga semua siswa dapat berpartisipasi dan berhasil dalam kelas reguler yang ada di sekolah tetangga atau sekolah terdekat. Dengan demikian kehadiran pendidikan inklusif

berpotensi mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi setiap anak dengan segala keragamannya, terutama anak berkebutuhan khusus. Keuntungan dari pendidikan inklusif semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi. Selain itu tenaga pengajar/guru harus memiliki keahlian dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan program pendidikan inklusi.

Guru merupakan elemen penting dalam mempengaruhi anak berkebutuhan khusus. Seorang guru harus memiliki sikap terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Guru memiliki tanggung jawab menciptakan suasana kelas yang dapat menampung secara penuh dan menekankan suasana yang mampu menghargai perbedaan individu (Ilahi dalam Asriningtyas 2015: 51). Komponen-komponen dalam

pelaksanaan pendidikan inklusif terdiri dari perencanaan pelaksanaan pendidikan inklusif yang meliputi modifikasi kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana, keuangan atau dana, lingkungan, alternatif penempatan; pelaksanaan sistem pendidikan inklusif yang meliputi merencanakan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, membina hubungan antar pribadi; evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif.

Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun sikap siswa agar selalu menghargai orang lain, terutama bagi mereka yang berada dalam kelompok berbeda. Agar peran guru berfungsi secara maksimal, maka diperlukan langkah-langkah berikut ini. Pertama, guru harus memiliki wawasan dan pemahaman yang baik tentang pentingnya sikap anti diskriminatif terhadap anak berkebutuhan khusus. Dengan wawasan dan pemahaman yang cukup, maka guru dapat diharapkan sebagai motor penggerak utama yang akan membangun kesadaran siswa untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang diskriminatif. Kedua, guru sebagai penggerak utama untuk kesadaran siswa agar selalu menghindari sikap yang

diskriminatif diharapkan mampu mempraktekkan wacana anti diskriminasinya secara langsung di dalam dan di luar kelas, termasuk juga di luar sekolah. Dengan melakukan praktek secara langsung dihadapan siswa, maka diharapkan siswa akan mencontoh dan juga menerapkan sikap yang sama dalam kehidupan mereka di masyarakat. Ketiga, guru seharusnya memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap siswa berkebutuhan khusus, terutama ketika melihat adanya diskriminasi yang berkaitan dengan perbedaan kemampuan ini.

Selain peran sentral yang dimainkan oleh guru dalam menanamkan sikap anti diskriminasi, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh sekolah untuk mendukung hal tersebut, agar menjadi sekolah inklusif, pertama, adalah adanya undang-undang atau peraturan sekolah yang menekankan dan menyatakan bahwa sekolah menerima siswa normal dan siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda, dan sekolah juga menjamin siswa yang normal maupun yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan perlindungan dan layanan yang sama sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal paling substansial adalah peraturan tersebut adalah melarang



tindakan diskriminasi. Kedua, sekolah harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan dan pelayanan-pelayanan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus. Seperti guru harus mempunyai keterampilan khusus untuk menangani siswa berkebutuhan khusus. Kemudian menyediakan fasilitas khusus, seperti tempat duduk khusus, tempat parkir khusus, jalan khusus dan fasilitas belajar dan sarana pendukung lainnya, yang dapat mendukung dan memperlancar aktivitas belajar mereka. Ketiga, sekolah sebaiknya menerapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang normal dan berkebutuhan khusus. Kurikulum ini substansinya tidak hanya menekankan bagaimana membuat para siswa mudah memahami mata pelajaran yang diajarkan. Akan tetapi juga bertujuan bagaimana agar seluruh siswa, dapat saling memahami, menghormati, dan menghargai satu sama lain. Keempat, sekolah memberikan pelatihan kepada para guru maupun para staf atau para stakeholder di sekolah, tentang bagaimana cara bersikap dan cara menghadapi siswa difabel dan siswa yang normal di sekolah secara santun dan manusiawi (Prastiyono, 2013: 117). Selain guru kelas di dalam pelaksanaan pendidikan inklusi keberadaan guru

pendamping jelas (*shadow teacher*) juga memiliki peranan yang penting dalam proses pembelajaran di kelas.

Kebutuhan guru pendamping kelas (*shadow teacher*) di sekolah inklusi sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi untuk prioritas terpenuhinya. Hal ini sesuai dengan hasil kajian dari Ludlow (dalam Nur'aeni 2014) yang mengemukakan bahwa Sekolah pedesaan telah mengalami masalah utama yang berhubungan dengan aspek persiapan dari SDM dalam pendidikan khusus: kurangnya program pelayanan khusus yang dirancang untuk mempersiapkan personil untuk program sekolah inklusi, SDM lebih tepat bila dilatih dan kesulitan yang signifikan dalam merekrut, mempertahankan dan pelatihan ulang untuk guru pendamping (*shadow teacher*) dan terapis. Florian (dalam Nur'aeni 2014) juga mengemukakan dalam artikelnya bahwa guru kelas sering melaporkan perasaan tidak siap untuk pendidikan inklusif. Artikel ini melaporkan beberapa pelajaran dari Proyek Praktek Inklusif, reformasi proyek pendidikan guru yang telah mengembangkan pendekatan inovatif untuk mempersiapkan guru untuk memasuki suatu profesi dimana mereka bertanggung jawab terhadap belajar dan

prestasi dari semua siswa di kelas inklusi. Itu mengidentifikasi beberapa isu penting, yaitu menjelaskan bagaimana menangani siswa, mempertimbangkan tantangan pengembangan profesional guru yang muncul dari studi proyek. Pelajaran penting berfokus pada pengembangan profesional guru dalam pembentukan pendekatan kurikuler baru untuk pembahasan pendidikan inklusif. Guru pendamping (*shadow teacher*) memiliki tugas yaitu membantu anak/peserta didik untuk; 1) tetap fokus pada pelajaran, 2) berpartisipasi secara tepat di kelas, 3) memberitahu guru jika anak tidak memahami materi, 4) bersikap positif pada tugas-tugas baru dan control diri, 5) berbagi kepentingan khusus dengan anak-anak lain, 6) merespon dengan tepat terhadap teman-teman dalam situasi sosial, 7) memperoleh informasi dan ketrampilan baru, 8) meningkatkan sosialisasi dengan teman sebaya, 9) mandiri dalam kegiatan kelas. *Shadow teacher* hendaknya dapat berkolaborasi dengan orang tua, guru, staf sekolah dan profesional lain dalam mendampingi masing-masing anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan

khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Oleh sebab itu inti dari pendidikan inklusi adalah hak azasi manusia atas pendidikan. Suatu konsekuensi logis dari hak ini adalah semua anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang tidak mendiskriminasikan dengan kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan dan lain-lain. Salah satu hal yang menarik adalah tindakan yang dilakukan oleh para orangtua dari anak-anak berkebutuhan khusus ini dalam menyekolahkan anak-anaknya yang berkebutuhan khusus. Undang-Undang tentang pendidikan di Indonesia memang jelas mengamanatkan tidak adanya diskriminasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan, namun pada kenyataannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Para orangtua dengan anak berkebutuhan khusus harus bekerja dan berusaha ekstra untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya. Mendapatkan pendidikan formal bukanlah hal yang mudah, karena tidak semua sekolah dapat menerima siswa dengan kebutuhan khusus. Disinilah terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam hal pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Semakin banyaknya keberadaan sekolah

inklusi akan sangat membantu para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dalam hal pendidikan. Meski masih terbatas namun keberadaan sekolah inklusif pada Kota Purwokerto menunjukkan bahwa saat ini, masyarakat mulai terbuka dan dapat menerima perbedaan yang ada disekitarnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang tua dari anak berkebutuhan khusus mulai memilih menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah formal yang umum daripada sekolah luar biasa atau sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus seperti yang terjadi di SDN 1 Tanjung. Memang bukan hal yang mudah dalam menciptakan dan melaksanakan pendidikan inklusi di Indonesia akan tetapi segala kendala yang dialami di lapangan hendaknya bisa menjadi perhatian seluruh aspek masyarakat terutama pemerintah agar lebih memperhatikan program pendidikan inklusi. Karena pada hakekatnya pendidikan bukan milik mereka yang mampu namun pendidikan adalah hak asasi setiap manusia di dunia.

### **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka beberapa simpulan dalam penelitian ini adalah 1) model

pembelajaran inklusi yang dilakukan guru SD N 1 Tanjung yaitu model klasikal dimana siswa normal digabung dengan siswa berkebutuhan khusus dalam menerima pelajaran serta model individual yaitu dengan memberikan bimbingan individual dan jam belajar tambahan; 2) strategi guru dalam pembelajaran inklusi diantaranya mengatur posisi tempat duduk serta menggunakan metode yang menjadikan siswa aktif di kelas. Guru juga melakukan semacam games/permainan dan juga menyanyi agar siswa tidak merasa jenuh; dan 3) kendala SD N 1 Tanjung dalam pelaksanaan sekolah inklusi diantaranya kurangnya tenaga pengajar/guru yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi atau dari PLB serta masih terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki.

Beberapa saran yang dapat disampaikan yakni, 1) bagi sekolah agar dapat mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan sekolah inklusi yang sudah berjalan demi terwujudnya pendidikan yang merata, 2) bagi orang tua yang memiliki siswa berkebutuhan khusus agar lebih memperhatikan perkembangan anak baik akademik maupun non akademik, serta 3) bagi pemerintah agar lebih

memperhatikan program pendidikan inklusi. Karena pada hakekatnya pendidikan bukan milik mereka yang mampu namun pendidikan adalah hak asasi setiap manusia di dunia.

11, No. 1, Hal. 117 – 128.  
Pascasarjana – Untag Surabaya.

Sunaryo. 2009. Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa). *Makalah*. Bandung: UPI.

### Daftar Pustaka

Anjaryati, Fibriana. 2011. Pendidikan Inklusi Dalam Pembelajaran *Beyondcenters And Circle Times* (Bcct) Di Paud InklusiAhsanu Amala Yogyakarta. Tesis . Yogyakarta: UIN Kalijaga.

Asriningtyas, Rosmalina. 2015. Sikap Guru Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SD Inklusif Se-Kabupaten Purbalingga *Skripsi*. UNY.

Nugroho, A. 2016. *Pendidikan special untuk yang spesial*. Prosiding Seminar Nasional Menjadi Guru Inspirator “Kenali Dan Kembangkan Kemampuan Intelegensi Generasi Emas Untuk Indonesia Emas. Purwokerto: UMP.

Nur’aeni, dkk. 2014. Model Program Pembelajaran Individual Untuk Peserta Didik Dengan Kesulitan Belajar Melalui Pelatihan Terapi Gerak Bagi Shadow Teacher di SD Inklusi. *Prosiding SnaPP 2014 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*. ISSN 2089-3590/EISSN 2303-2472

Prastiyono. 2013. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif (Studi di Sekolah Galuh Handayani Surabaya). *DIA, Jurnal Administrasi Publik Juni 2013, Vol.*